

PENERAPAN PSAK NO. 45 PADA LAPORAN KEUANGAN YAYASAN PENDOK PESANTREN AL-HUDA SENDANG PRAGAAN SUMENEP MADURA UNTUK MEWUJUDKAN AKUNTABILITAS KEUANGAN

Rusdiyanto

ABSTRAK

Penelitian tentang “Penerapan PSAK No 45 Pada Laporan Keuangan Yayasan Pondok Pesantren Al- Huda Desa Sendang Pragaan Sumenep” bertujuan untuk mewujudkan Akuntabilitas Keuangan dan bertujuan untuk mengetahui dan meneliti penerapan akuntansi pada yayasan tersebut. Waktu penelitian terjadi pada bulan Februari 2016. Pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari sumbernya secara langsung dengan metode wawancara berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disiapkan. Sedangkan data sekunder berupa laporan keuangan yang terbaru. Manajemen Yayasan tersebut secara berkala harus menerbitkan laporan keuangannya. Laporan ini menjadi sangat strategis dalam rangka meningkatkan kepercayaan para calon donatur. Keyakinan mereka terhadap yayasan dapat dibangun melalui laporan keuangan yang benar. Laporan keuangan yang dibuat oleh yayasan haruslah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, yaitu sesuai dengan prinsip akuntansi, Pengakuan, Pengukuran, Pengungkapan dan Penyajian. Oleh karena bentuk pertanggungjawaban keuangan yayasan belum bisa diseragamkan karena sampai saat ini belum ada suatu standar akuntansi untuk Yayasan. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan untuk meneliti semua dana yang terdapat dalam operasional yayasan ini, dan tidak hanya dibatasi dana zakat sebaiknya juga diteliti dana ZISWAF (Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf).

Kata kunci: *Laporan Posisi Keuangan, Laporan Aktivitas, Laporan Arus Kas, Catatan atas Laporan Keuangan.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Yayasan merupakan organisasi non pemerintah yang beraktifitas di luar struktur politik yang terintitusionalisasi dan merupakan entitas jasa sukarelawan yang bertujuan untuk membantu sesama dalam mengurangi masalah sosial, berdasarkan Undang-Undang No 16 tahun 2001, yayasan adalah badan kekayaan hukum yang terdiri atas kekayaan yang di pisahkan dan di peruntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota, disebutkan juga bahwa yayasan termasuk salah ssatu entitas nirlaba di indonesia. Menurut program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri, entitas nirlaba adalah salah suatu entitas yang bertujuan utama untuk mendukung atau terlibat aktif dalam beerbagai aktifitas publik tanpa berorientasi untuk mencari keuntungan moneter atau komersil. Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan oleh berbagai pihak. Laporan keuangan yang utama terdiri atas laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan laporan arus kas, oleh karena itu, yayasan juga membutuhkan standart akuntansi untuk membuat laporan keuangan yang sesuai.

Keadaan sosial masih menjadi masalah utama dalam pemerintahan Indonesia, seperti kemiskinan, kebodohan, kesehatan maupun kelaparan. Keberadaan yayasan menjadi sangat penting karena membantu lembaga pemerintah dalam pemberian kesejahteraan kepada masyarakat

Yayasan merupakan organisasi non pemerintah yang beraktifitas diluar

struktur politik yang terinstusionalisasi dan merupakan entitas jasa

Kinerja keuangan dengan menggunakan berbagai macam rasio, yaitu rasio likuiditas dan rasio solvabilitas, rasio aktivitas, dan rasio profitabilitas, untuk pertimbangan dalam pengambilan keputusan di masa yang akan datang.

SAK ETAP adalah standart akuntansi yang disusun sebagai acuan dan di maksudkan untuk di gunakan entitas tanpa akuntabilitas publik yang di maksudkan agar semua unit usaha menyusun laporan keuangan sesuai dengan standart yang di ditetapkan. Dalam SAK ETAP tidak mengijinkan pengakuan pospos dalam neraca yang tidak memenuhi definisi aset atau kewajiban dengan mengabaikan apakah pos-pos tersebut merupakan hasil dari penerapan *matching concept*.

Analisis laporan keuangan mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, dan untuk membatasi ruang lingkup permasalahan di atas, maka Peneliti hanya akan membahas tentang kesehatan keuangan ditinjau dari rasio likuiditas dan rasio solvabilitas untuk menilai kinerja perusahaan pada CV. Sari Jaya yang bergerak dibidang budi daya udang.

Laporan keuangan disusun berdasarkan standart akuntansi keuangan (SAK) yang telah di ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Standart akuntansi keuangan memberikan fleksibilitas bagi manajemen dalam memilih metode maupun estimasi yang di gunakan PSAK No. 45 merupakan standart akuntansi keuangan bagi entitas nirlaba yang telah efektif di berlakukan sejak 1 januari 2015.

Sukarelawan yang bertujuan untuk membantu sesama dalam mengurangi masalah sosial, karena itu Yayasan termasuk organisasi yang bergerak pada

entitas nirlaba. Berdasarkan Undang-undang nomor 1 tahun 2001 yayasan diharuskan untuk menyusun laporan keuangan dan standar laporan keuangan yang diharuskan adalah PSAK No. 45 karena mencakup 4 laporan keuangan yaitu laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan.

Dalam PSAK No.45 tahun 2015 di sebutkan bahwa kemampuan untuk menyediakan informasi yang relevan untuk memenuhi kepentingan para penyumbang, anggota organisasi, kreditur dan pihak lain yang menyediakan informasi mengenai Asset kewajiban, dan Asset bersih dan informasi mengenai hubungan di antara unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu, laporan keuangan organisasi nirlaba meliputi laporan posisi keuangan pada akhir periode pelaporan, laporan aktiivitas serta laporan arus kas untuk satu peride pelaporan, dan catatan atas laporan keunagan, posisi keuangan menyediakan informasi aset, liabilitas, aset neto, dan infomasi mengenai hubungan di antara unsur-unsur tersebut, laporan ini harus menyajikan secara terpisah aset neto baik yang terikat maupun yang tidak terikat penggunaanya, prtanggung jawaban manager mengenai kemampuan mengelola sumber daya entitas nirlaba yang di terima dari para penyumbang di sajikan melalui laporan aktivitas dan laporan arus kas, laporan aktivitas mnyajikan informasi mengenai perubahan yang tejadi dalam kelompok aset neto.

Melihat latar belakang tersebut, maka penelitian bertujuan untuk mengkaji penerapan PSAK No 45 Pada Laporan Keuangan Yayasan Pondok Pesantren Al- Huda Untuk Mewujudkan Akuntabilitas Keuangan. Untuk mencapai transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, komparabilitas, serta kesesuaian antara

laporan keuangan organisasi nirlaba dengan standar yang berlaku saat ini yakni PSAK 45, maka Peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Penerapan PSAK No 45 Pada Laporan Keuangan Yayasan Pondok Pesantren Al-Huda Desa Sendang Pragaan Sumenep Untuk Mewujudkan Akuntabilitas Keuangan “.

Rumusan Masalah

Bagaimanakah penerapan PSAK No. 45 pada laporan keuangan Yayasan Pondok Pesantren Al- Huda Desa Sendang Pragaan Sumenep untuk mewujudkan akuntabilitas keuangan?.

Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui penerapan Standar Akuntansi yang dimiliki dimana terdiri dari pengakuan, pengukuran, yang terjadi pada Yayasan Pondok Pesantren Al- Huda Desa Sendang Pragaan Sumenep Madura kesehatan keuangan CV. Sari Jaya apabila ditinjau dari rasio likuiditas dan rasio solvabilitas.

TINJAUAN PUSTAKA

Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan dasar bagi upaya analisis atas suatu perusahaan. Dalam kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan dalam standar akuntansi keuangan (SAK) dinyatakan bahwa pengguna laporan keuangan yang dimaksud meliputi investor, karyawan, pemberi pinjaman, pemasok dan kreditor usaha lainnya, pelanggan, pemerintah serta lembaga-lembaga lainnya masyarakat.

Menurut PSAK No. 1 tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi tentang posisi keuangan,

kinerja keuangan dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggung jawaban manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang di berikan kepada mereka, keputusan-keputusan tersebut mencakup misalnya, keputusan untuk menahan atau menjual investasi mereka dalam entitas atau keputusan untuk mengangkat kembali atau menganakta manajemen, dalam rangka mencapai tujuan tersebut, laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas yang meliputi :

“Aset, Liabilitas, Ekuitas, Pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian, kontribusi dan distribusi pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik dan arus kas.

Berdasarkan definisi Laporan Keuangan diatas, Peneliti dapat menyimpulkan bahwa laporan keuangan merupakan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dinyatakan bahwa pengguna laporan keuangan yang dimaksud meliputi investor, karyawan, pemberi pinjaman, pemasok dan kreditor usaha lainnya, pelanggan, pemerintah serta lembaga-lembaga lainnya masyarakat.

Laporan Keuangan untuk Entitas Nirlaba (PSAK No. 45 Tahun 2015)

Karakteristik entitas nirlaba berbeda dengan entitas bisnis, perbedaan utama yang mendasar terletak pada cara entitas memperoleh sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas operasinya.

Berdasarkan definisi diatas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa

Laporan keuangan untuk Entitas Nirlaba adalah Karakteristik entitas nirlaba berbeda dengan entitas bisnis, perbedaan utama yang mendasar terletak pada cara entitas memperoleh sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas operasinya.

Komponen Laporan Keuangan Entitas Nirlaba (PSAK No. 45 Tahun 2015)

1. Laporan Posisi Keuangan

Laporan posisi keuangan adalah untuk menyediakan informasi mengenai aset, liabilitas, dan aset neto serta informasi mengenai hubungan di antara unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu. Informasi dalam laporan posisi keuangan lainnya, dapat membantu pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali, anggota, kreditor, dan pihak-pihak lain untuk menilai :

- a. Kemampuan entitas nirlaba untuk memberikan jasa secara berkelanjutan.
- b. Likuiditas, fleksibilitas keuangan, kemampuan untuk memenuhi kewajibannya, dan kebutuhan pendanaan eksternal.

Menyediakan informasi mengenai aset, liabilitas, dan aset neto serta informasi mengenai hubungan diantara unsur-unsur tersebut pada waktu Siklus Akuntansi.

2. Laporan Aktivitas

Informasi dalam laporan aktivitas, yang di gunakan bersama dengan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan lainnya, dapat membantu pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan kembali, anggota, kreditor, dan pihak lainnya untuk :

- a. Mengevaluasi kinerja dalam satu periode

- b. Menilai upaya, kemampuan dan kesinambungan entitas nirlaba dan memberikn jasa.
- c. Menilai pelaksanaan tanggung jawab dan kinerja manajer.

Menyediakan informasi mengenai pengaruh transaksi, hubungan antar transaksi, sehingga bisa mengetahui kinerja operasional selama periode akuntansi.

3. Laporan Arus Kas

Tujuan utama laporan arus kas adalah menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam satu periode, dalam penyajiannya, laporan arus kas entitas nirlaba di sajikan sesuai PSAK Nomor 2 tahun 2015 tentang laporan arus kas, laporan arus kas harus melaporkan arus kas selama periode tertentu dan diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi dan pendanaan entitas nirlaba nirlaba harus melaporkan arus kas dan aktivitas operasi dengan menggunakan salah satu dari metode berikut ini :

- a. Metode Langsung : dengan metode ini kelompok utama dari penerimaan kas bruto dan pengeluaran kas bruto di ungkapakan.
- b. Metode Tidak Langsung : dengan metod ini laba atau rugi di sesuaikan dengan mengoreksi pengaruh dan transaksi non kas, penangguhan (*deferral*) atau akrual dari penerimaan atau pembayaran kas untuk operasi di masa lalu dan masa depan, dan unsur penghasilan atau beban yang terkait dengan arus kas investasi atau pendanaan.

Menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam selama Siklus Akuntansi.

4. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) bertujuan memberikan informasi tentang perkiraan-perkiraan yang dinyartakan dalam laporan keuangan, Catatan Atas Laporan Keuangan adalah penjelasan yang di lampirkan bersama-sama dengan laporan keuangan dan menjadi dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan laporan posisi keuangan, laporan aktivitas dan laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan memberikan penjelasan naratif dari pos-pos yang di sajikan dalam laporan keuangan tesebut dan inforasi mengenai pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan(PSAK No. 1 tahun 2015). Menurut PSAK No. 45 tahun 2015 catatan atas laporan keuangan memuat hal-hal sebagai berikut :

- a. Informasi umum mengenai lembaga.
- b. Kebijakan akuntansi yang di gunakan dalam penyusunan laporan keuangan.
- c. Penjelasan dari setiap akun yang di anggap memerlukan rincian lebih lanjut.
- d. Kejadian setelah tanggal neraca

Informasi tambahan lainnya yang di anggap perlu, baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.

Tujuannya adalah untuk menjelaskan secara rinci laporan keuangan yang ada di Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Aktivitas informasi pada laporan keuangan selama Siklus Akuntansi.

Akuntabilitas

Pengertian Akuntansi

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban-kewajiban dari

individu-individu atau penguasa yang di percayakan untuk mengelola sumber daya publik yang dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggung jawabannya, akuntabilitas terkait erat dengan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan publik dan menyampaikannya secara transparan kepada masyarakat.

Pengertian akuntabilitas menurut Lawton dan Rose dapat di katakan sebagai sebuah proses di mana seorang atau kelompok orang yang di perlukan untuk membuat laporan aktivitas mereka dengan cara yang mereka sudah atau belum di ketahui untuk melaksanakan pekerjaan mereka, akuntabilitas adalah pertanggung jawaban dari seorang atau kelompok orang yang di beri amanat untuk menjalankan tugas tertentu kepada pihak pemberi amanat baik secara vertikal (atasan) maupun secara horisontal (masyarakat).

Dimensi Akuntabilitas

Menurut Ibrahim (2012:24) menjelaskan bahwa terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus di penuhi oleh organisasi sektor publik (badan hukum), yaitu :

1. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum Akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan, sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang di syaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.
2. Akuntabilitas proses Akuntabilitas proses terkait dengan prosedur yang telah di gunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem

informasi akuntansi, sistem akuntansi manajemen dan prosedur administrasi, akuntabilitas proses termanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif.

3. Akuntabilitas kebijakan.

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggung jawaban pembina, pengurus, dan pengawas atas kebijakan yang diambil.

Akuntabilitas Keuangan

Menurut lembaga administrasi negara yang seperti dikutip badan pengawas keuangan dan pembangunan (2000:24) mendefinisikan akuntabilitas keuangan sebagai pertanggung jawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, laporan keuangan yang mencakup penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran, keuangan entitas nirlaba, komponen pembentuk akuntabilitas keuangan terdiri atas :

1. Integritas keuangan

Menurut kamus besar bahasa indonesia integritas berarti kejujuran, keterpaduan, kebulatan, dan keutuhan, integritas merupakan pencerminan dari kejujuran penyajian agar laporan keuangan dapat di andalkan informasi yang terkandung didalamnya dan menggambarkan secara jujur transaksi yang seharusnya di sajikan secara wajar dan jujur.

2. Pengungkapan konsep pengungkapan

mewajibkan agar laporan keuangan didesain dan disajikan sebagai kumpulan gambaran atau kenyataan dari kejadian ekonomi yang memengaruhi instansi akuntan publik (entitas nirlaba) untuk satu periode dan berisi cukup informasi.

3. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan akuntansi dan

pelaporan keuangan entitas nirlaba harus menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundangan yang berkaitan dengan pelaksanaan akuntansi entitas nirlaba, apabila terdapat pertentangan antara standart akuntansi keuangan entitas nirlaba dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi maka yang di gunakan adalah peraturan perundangan yang lebih tinggi.

Yayasan

Berdasarkan UU. No. 16 Tahun 2001 yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan dalam mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota, yayasan mendirikan badan usaha yang kegiatannya sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan, yayasaan memperoleh sumber daya yang dibutuhkan untuk memperoleh aktivitas operasinya dari sumbangan, atau bantuan yng tidak mengikat, wakaf, hibah dan perolehan lain yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar atau peraturan perundangan yang berlaku, yayasan tidak ada kepemilikan (anggota), sehingga bila mendapatkan laba atau keuntungan digunakan untuk mengembangkan kualitas yayasan.

Yayasan wajib untuk membuat laporan keuangan sesuai aturan UU. No. 28 Tahun 2004. Laporan keuangan yang saling sesuai bagi yayasan adalah laporan keuangan yang berdasarkan PSAK No.45 tentang entitas nirlaba, laporan keuangan tersebut harus menyajikan laporan akyivitas, laporan posisi keuangan, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang dapat menggambarkan kondisi keungan yayasan dan dapat di gunakan dalam menganmbil keputusan.

Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian terdahulu yang relevan dengan judul ini yang dapat di jadikan sebagai acuan yaitu penelitian yang di lakukan oleh :

1. Nisa Puritan (2013) dengan judul “Analisa Implementasi PSAK No. 45 Pada Laporan Keuangan Yayasan Dinas Sosial di Surabaya” hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem yang diterapkan pada yayasan tersebut sudah melaksanakan penyusunan laporan posisi keuangan terbukti (laporan arus kas dan laporan aktivitas) namun belum menerapkan yang sesuai dengan standart akuntansi PSAK No 45.
2. Nurdiono (2010) dengan judul “Analisa PSAK No 45 Pada Organisasi Pengelola Zakat Yayasan Daruttaqwa di Semarang” penelitian bertujuan untuk mengetahui apakah organisasi pengelola zakat daruttaqwa telah mnerapkan PSAK No 45 dalam pelaporan keuangannya, dan hasil menunjukkan bahwa yayasan daruttaqwa tersebut belum menerapkan PSAK No 45 dan masih menggunakan pelaporan yang sederhana, yaitu laporan arus kas penerimaan dan pengeluaran saja, sehingga akuntabilitas terhadap publik sangat rendah.

Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah menerapkan PSAK No 45 yang sesuai dengan standart akuntansi Keuangan di indonesia, perbedaan dari penlitian adalah terletak pada lokasi dan data yang digunakan, perbedaan lokasi dan data yang diteliti ini yang akan menghasilkan informasi serta hasil penelitian yang berbeda sesuai dengan keadaan yayasan yang diteliti.

METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini adalah Yayasan Pondok Pesantren Al-Huda Desa Sendang Pragaan Sumenep yang berlokasi Di Desa Sendang Pragaan Sumenep Madura.

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif, metode yang dilakukan adalah metode wawancara, Observasi, pengamatan dan studi dokumentasi. Metode yang digunakan adalah metode studi kasus karena berkenaan dengan *how* atau *why*.

Fokus dan Dimensi Penelitian

Fokus pembahasan dalam penelitian ini pada permasalahan mengenai Yayasan yang belum menerapkan PSAK No 45 dalam laporan keuangannya.

Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer : Data yang berasal langsung dari sumbernya.
2. Data Skunder : Data yang berasal dari Yayasan berupa laporan keuangan terbaru.

Metode Pengumpulan Data

1. Observasi
2. Dokumen
3. Wawancara

Metode Analisis Data

Bertujuan untuk memberikan informasi tambahan tentang pemikiran-pemikiran dalam laporan keuangan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Perusahaan

Yayasan Pondok Pesantren Al-Huda Desa Sendang Pragaan Sumenep Madura adalah sebuah organisasi nirlaba yang bergerak dibidang sosial yang didirikan tanggal 28 Februari 1980. Dan berkedudukan di Desa Sendang Pragaan Sumenep Madura.

Hasil Penelitian

1. Melakukan Pencocokan
2. Mengevaluasi
3. Menyeleksi hasil wawancara
4. Menggabungkan semua jawaban yg diperoleh dari observasi.
5. Kesimpulan
6. Pemberian perbaikan dan saran bagi yayasan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, dihasilkan simpulan bahwa Yayasan Pondok Pesantren Al- Huda Desa Sendang Pragaan Sumenep madura belum menerapkan laporan keuangan sesuai dengan PSAK No. 45 sehingga akuntabilitas keuangan belum bisa menjadi lebih baik dan dapat belum dipercaya oleh para donatur untuk disalurkan kepada anak- anak Yayasan Pondok Pesantren Al-Huda Desa Sendang Pragaan Sumenep Madura.

Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang diajukan adalah :

Diharapkan yayasan tetap menyusun laporan keuangan sesuai PSAK

No. 45 yang terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan aktifitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Hal ini bertujuan agar penilaian kinerja organisasi diperiode berikutnya tetap dapat dilakukan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Horngren, Charles T., Harrison, Walter T. 2007. *Akuntansi*. Erlangga : Jakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2009. *Standar Akuntansi Keuangan per 1 Juli 2009*. Salemba Empat : Jakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2012. *Standar Akuntansi Keuangan per 1 Juni 2012*. Salemba Empat : Jakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 2009. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 1 Revisi 2009..* Salemba Empat : Jakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2004. *Standar Akuntansi Keuangan per 1 Oktober 2004*. Salemba Empat : Jakarta.
- Indra Bastian. 2010. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Edisi Ketiga. Erlangga : Jakarta
- Jusuf Halim. 2004. *Standar Akuntansi Keuangan*. Salemba : Jakarta.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Empat. ANDI : Yogyakarta.
- Nisa Puritan. 2013. *Analisis Implementasi PSAK No 45*. Skripsi. Universitas Negeri Surabaya : Surabaya.
- Nurdiono. 2007. *Penerapan PSAK Nomor 45 Pada Organisasi Pengelola zakat*. Skripsi. Universitas Negeri Semarang : Semarang.
- Program Studi Akuntansi dan Manajemen. 2014. *Pedoman Penelitian Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Gresik : Gresik.
- Rustam Ibrahim. 2012. *Akuntabilitas*. Edisi Pertama. Konsil LSM Indonesia : Jakarta.
- Siddharta, Basuki. 2004. *Komite Prinsip Akuntansi Indonesia*. Salemba Empat : Jakarta.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta : Bandung.
- Yadiati Wiwin. 2007. *Teori Akuntansi Suatu Pengantar*. Edisi Pertama. Prenada Media Grup : Jakarta.